KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BBM Subsidi semoga tidak langka, komisi XII: antisipasi dampak lanjutan kenaikan pertamax cs
Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

BBM Subsidi Semoga Tidak Langka

Komisi XII: Antisipasi Dampak Lanjutan Kenaikan Pertamax Cs

Senayan meminta Pemerintah dan Pertamina mengantisipasi dampak lanjutan penyesuaian harga BBM nonsubsidi (Pertamax). Penyesuaian harga itu berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi (Pertalite).

ANGGOTA Komisi XII DPR Meitri Citra Wardani mengatakan, BBM nonsubsidi memang tidak dikonsumsi langsung oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, langkah antisipasi dini harus dilakukan agar kenaikan BBM tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.

Meitri memahami, penyesuaian harga Pertamax mengikuti dinamika minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun, Pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga. "Efek berantai dari potensi migrasi pengguna ke BBM bersubsidi harus diwaspadai karena menekan kuota energi," katanya, Kamis (11/6/2026).

Selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite, kata Meitri, berpotensi mengubah perilaku konsumen kelas menengah. Jika pergeseran terjadi secara masif, maka distribusi BBM bersubsidi harus dijaga ketat. Itu dilakukan agar hak masyarakat miskin tidak dirugikan akibat kelangkaan.

Meitri meminta Pemerintah segera memetakan dampak penyesuaian harga itu terhadap konsumsi energi nasional. Perhitungan yang matang mengenai kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat sangat dibutuhkan. Langkah strategis ini akan menjaga stabilitas pasokan bahan bakar di masyarakat.

Selanjutnya, dia mendorong Pemerintah lewat BPH Migas memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Upaya itu bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penimbunan di lapangan. "Tindakan tegas akan meminimalkan risiko kepanikan saat terjadi lonjakan permintaan dari konsumen kelas menengah," ujarnya.

Pemerintah, sambungnya, harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan di lapangan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat miskin kesulitan memperoleh BBM bersubsidi akibat meningkatnya permintaan dari kelompok mampu. Seluruh lini penyaluran harus dipantau ketat demi keadilan bagi rakyat yang membutuhkan bantuan.

Di tengah ketidakpastian global, Pemerintah diharapkan bisa memprediksi pergerakan harga minyak mentah. Selain mitigasi, tata kelola yang baik dalam aspek pengelolaan energi nasional harus dihadirkan. "Kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak harus segera diwujudkan," ucapnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi XII DPR Sartono menekankan, kebijakan pasar internasional itu perlu diimbangi program penyeimbang. Kebijakan penyeimbang harus diambil guna meringankan beban ekonomi masyarakat secara langsung. Selain itu, kebijakan pendukung itu berfungsi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia memahami, penyesuaian harga BBM merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar dan energi global. Namun, Pemerintah juga wajib memperhitungkan dampak penyesuaian itu terhadap tingkat inflasi daerah. Penurunan daya beli masyarakat harus diantisipasi melalui berbagai program jaring pengaman sosial yang efektif. ■ PYB